



**PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

LPJ

**LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN**

TAHUN 2025

Disusun Oleh :

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung,

2026

Plh. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG,



BUDI ARDIYANTO, ST., MM.

Pembina IV/a

NIP. 19811229 201001 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Dasar Hukum
- 1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

BAB II PERUBAHAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

- 2.1 Perubahan Anggaran
- 2.2 Realisasi Anggaran

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

- 3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan
- 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LPJ Tahun Anggaran 2024 (yang terkait dan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah)
- 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan
- 4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 3);
16. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 32);
17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

1.2. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Pembentukan Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan Walikota.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup meliputi bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- pengelolaan urusan dibidang lingkungan hidup, pertamanan, pengelolaan sampah dan Limbah B3, Ruang Terbuka hijau (RTH) serta penegakan hukum di bidang lingkungan;
- pengkoordinasian dengan instansi/lembaga terkait di bidang lingkungan hidup;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;
- penerbitan Persetujuan dan Perizinan di bidang Lingkungan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dibidang

kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kearsipan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- pengelolaan urusan penyusunan program, pemberian informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan retribusi dan aset; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas nya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sekretariat dibantu oleh beberapa sub bagian yaitu :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- pengelolaan dan pengadministrasian umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola sarana dan prasarana rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan aset dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, perbendaharaan, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas;
- pengelolaan urusan aset dinas;
- pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya;
- pengelolaan retribusi; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Tata Lingkungan

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang inventarisasi sumber daya alam, menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi Mutu Air dan Mutu Udara;
- koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- penyusunan NSDA dan LH, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- perencanaan ruang terbuka hijau, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan, pengawetan, pencadangan ruang sumber daya alam serta pemanfaatannya secara lestari;
- penetapan kebijakan, pelaksanaan ruang terbuka hijau, konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
- penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- pelaksanaan inventarisasi GRK, penyusunan profil emisi GRK, dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- menyusun rencana program, pemeliharaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta merumuskan petunjuk teknis di bidang pertamanan dan penghijauan;
- menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan baku mutu emisi;
- koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), Audit LH, Analisis resiko LH);
- mengajukan usulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pengelolaan sampah mempunyai fungsi:

- penyusunan informasi, merumuskan kebijakan pengelolaan sampah tingkat kota;
- pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry, proses daur ulang sampah;
- perumusan kebijakan penanganan sampah skala kota;
- koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- penetapan lokasi TPS, TPST, dan TPA sampah serta pengawasan terhadap tempat pengelolaan sampah;
- merumuskan bahan kebijakan dan program bidang sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan taman;
- merencanakan kebutuhan sarana prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan taman serta melakukan monitoring dan evaluasi;
- pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- pelaksanaan kerjasama dan investasi dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- perumusan, pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sampah dan limbah B3 serta menerbitkan Persetujuan Teknis untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 kota; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan. Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan meliputi pemantauan, penanggulangan dan pemulihan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah serta sumber pencemar institusi dan non institusi;
- penentuan baku mutu lingkungan;
- pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- penentuan baku mutu sumber pencemar;
- melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air dalam wilayah kota;

- pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- pelaksanaan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- penentuan kriteria baku dan pemantauan kerusakan lingkungan;
- pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penaatan dan peningkatan kapasitas meliputi penanganan pengaduan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)), dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);

- penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- sosialisasi tata cara pengaduan;
- pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)), dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)), dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- identifikasi, verifikasi, advokasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH; dan
- dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan. Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

7) Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

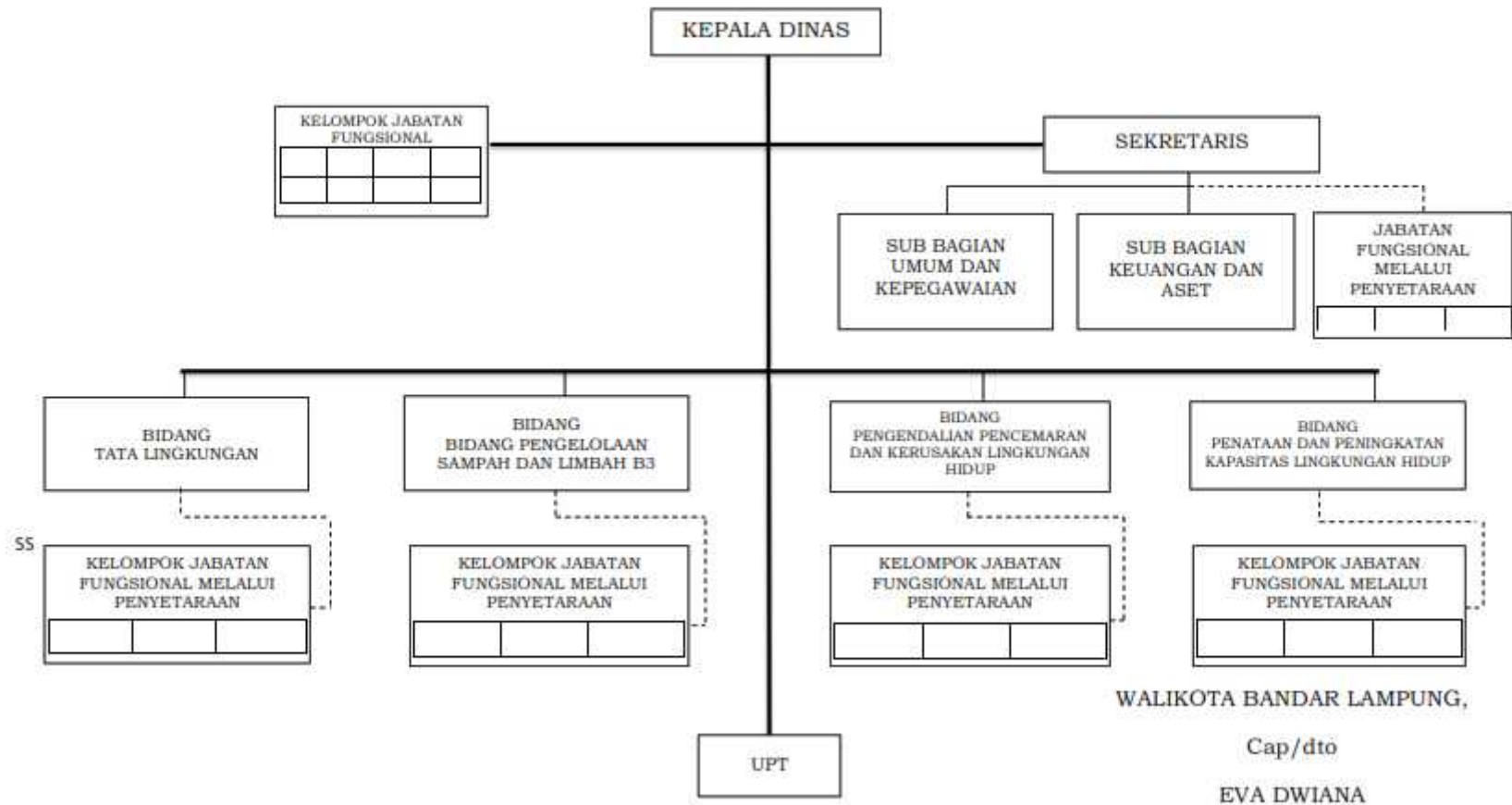
8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang ketrampilan dan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.2.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Struktur organisasi DLH Kota Bandar Lampung secara rinci adalah sebagaimana pada gambar berikut ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG



Gambar 1. Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, merumuskan tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2025-2029 adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif. Adapun rencana kerja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2025 berjumlah 8 (delapan) program kerja, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

2.1 Perubahan Anggaran

Tabel 2.1. Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub- Kegiatan	Indikator	Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan enunjang Urusan emerintahan Bidang Lingkungan Hidup	98%	60.661.930.681	Bandar Lampung	98%	62.118.320.582	Bandar Lampung
2.11.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	90%	59.993.857		90%	28.535.422	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	29.993.937		3 laporan	18.615.502	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	29.999.920		2 laporan	9.919.920	
2.11.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD	90%	20.512.948.130		90%	20.504.548.130	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	214/14 orang/bulan	20.254.191.155		214/14 orang/bulan	20.254.191.155	
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	258.756.975		1 dokumen	250.356.975	
2.11.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90%	75.000.000		90%	50.000.000	
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	5 orang	75.000.000		5 orang	50.000.000	
2.11.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	1 tahun	746.840.854		1 tahun	820.130.941	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	19.999.439		1 paket	19.999.439	

2.11.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	179.999.121		1 paket	178.289.208	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	59.999.310		1 paket	59.999.310	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	143.000.000		1 paket	143.000.000	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	159.840.545		1 paket	159.840.545	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	84.000.000		1 dokumen	84.000.000	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	100.002.439		1 laporan	175.002.439	
2.11.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	1 paket	801.751.870		1 paket	894.834.179	
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	235.000.000		1 unit	235.000.000	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	166.751.870		1 unit	131.839.270	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	400.000.000		1 unit	527.994.909	
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	1 tahun	25.328.200.000		1 tahun	25.341.225.478	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	128.200.000		12 laporan	141.225.478	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	12 laporan	25.200.000.000		12 laporan	25.200.000.000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	1 tahun	13.137.195.970		1 tahun	14.479.046.432	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	38.670.000		1 unit	58.670.000	

2.11.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	257 unit	12.117.330.000		211 unit	13.557.505.048	
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 unit	981.195.970		155 unit	862.871.384	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	401.067.120		1 dokumen	344.967.120	
		KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen			1 dokumen		
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	RPPLH Kota Bandar Lampung	1 dokumen	400.000.000		1 dokumen	343.900.000	
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	400.000.000		1 dokumen	343.900.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	KLHS Kota Bandar Lampung	2 dokumen	1.067.120		2 dokumen	1.067.120	
2.11.02.2.02.0005	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	1 dokumen	1.067.120		1 dokumen	1.067.120	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	69,27 indeks	575.000.000		69,27 indeks	407.660.000	
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	71,76 indeks			71,76 indeks		
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,82 indeks			41,82 indeks		
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	74990,93 TonCOe2			74990,93 TonCOe2		
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	1 dokumen	250.000.000		1 paket	60.092.981	

2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, sinkronasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	100.000.000		1 dokumen	54.900.000	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan	1 dokumen	150.000.000		1 dokumen	5.192.981	
2.11.03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	DIKPLHD Kota Bandar Lampung	1 dokumen	75.000.000		1 dokumen	64.900.000	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 laporan	75.000.000		1 laporan	64.900.000	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	1 kegiatan	250.000.000		1 lokasi	282.667.019	
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kab/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	250.000.000		1 kegiatan	282.667.019	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terkelola	479,57 Ha	400.000.000		479,57 Ha	400.000.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terkelola	479,57 Ha	400.000.000		479,57 Ha	400.000.000	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	479,57 Ha	400.000.000		479,57 Ha	400.000.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	90 badan usaha	275.000.000		90 badan usaha	123.857.672	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan	90 badan usaha	275.000.000		90 badan usaha	123.857.672	

2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan /atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan suratkelayakan operasi yang diberikan	1 dokumen	75.000.000		1 dokumen	47.682.672	
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	90 badan usaha	200.000.000		90 badan usaha	76.175.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	3 entitas	50.000.000		3 entitas	359.936	
2.11.09.2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	3 entitas	50.000.000		3 entitas	359.936	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	3 entitas	50.000.000		3 entitas	359.936	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	10 pengaduan	99.999.936		10 pengaduan	45.331.936	
2.11.10.2.01	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	10 pengaduan	99.999.936		10 pengaduan	45.331.936	
2.11.10.2.01.0004	Peengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	10 pengaduan	99.999.936		10 pengaduan	45.331.936	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang Ditangani	95%	14.891.193.418		95%	19.072.428.033	
		Persentase Jumlah Sampah yang Turkurangi melalui 3R	30%			30%		
		Persentase Cakupan Area Pelayanan	100%			100%		

		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	100%			100%		
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	100%	14.891.193.418		100%	19.072.428.033	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 kelompok	280.000.000		7 kelompok	528.319.500	
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 dokumen	14.511.193.418		1 dokumen	18.444.108.533	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST regional	250.000 ton	100.000.000		250.000 ton	100.000.000	

2.2 REALISASI ANGGARAN

Tabel 2.2 Penjabaran Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp.	%	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.118.320.582	57.762.206.239	92,99	4.356.114.343
2.11.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28.535.422	8.386.758	29,39	20.148.664
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18.615.502	4.716.758	25,34	13.898.744

2.11.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah.	9.919.920	3.670.000	37,00	6.249.920
2.11.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	20.504.548.130	19.896.603.250	97,04	607.944.880
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	20.254.191.155	19.687.781.250	97,20	566.409.905
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	250.356.975	208.822.000	83,41	41.534.975
2.11.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	50.000.000	9.006.500	18,01	40.993.500
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000	9.006.500	18,01	40.993.500
2.11.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	820.130.941	443.276.276	54,05	376.854.665
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.999.439	2.192.766	10,96	17.806.673
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	178.289.208	99.208.816	55,64	79.080.392
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	59.999.310	12.699.413	21,17	47.299.897
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	143.000.000	81.797.000	57,20	61.203.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	159.840.545	105.891.368	66,25	53.949.177
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	84.000.000	21.680.000	25,81	62.320.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	175.002.439	119.806.913	68,46	55.195.526
2.11.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	894.834.179	630.519.999	70,46	264.314.180
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	235.000.000	195.500.000	83,19	89.720.000
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan meubel	131.839.270	0	0	131.839.270
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	527.994.909	435.019.999	82,39	92.974.910
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	25.341.225.478	24.351.769.587	96,10	989.455.891

2.11.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	141.225.478	91.769.587	64,98	49.455.891
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	25.200.000.000	24.260.000.000	96,27	940.000.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	14.479.046.432	12.422.643.869	85,80	2.056.402.563
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	58.670.000	58.181.500	99,17	488.500
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional atau lapangan	13.557.505.048	11.742.313.369	86,61	1.815.191.679
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	862.871.384	622.149.000	72,10	240.722.384
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	344.967.120	338.728.000	98,19	6.239.120
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	343.900.000	338.728.000	98,50	5.172.000
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH kabupaten/kota	343.900.000	338.728.000	98,50	5.172.000
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	1.067.120	0	0	1.067.120
2.11.02.2.02.0005	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	1.067.120	0	0	1.067.120
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	407.660.000	266.837.028	65,46	140.822.972
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	60.092.981	36.750.028	61,16	23.342.953

2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, sinkronasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	54.900.000	36.750.028	66,94	18.149.972
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	5.192.981	0	0	5.192.981
2.11.03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	64.900.000	63.842.000	98,37	1.058.000
2.11.03.2.02.0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Masyarakat	64.900.000	63.842.000	98,37	1.058.000
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	282.667.019	166.245.000	58,81	116.422.019
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi	282.667.019	166.245.000	58,81	116.422.019
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	400.000.000	295.282.475	73,82	104.717.525
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	400.000.000	295.282.475	73,82	104.717.525
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	400.000.000	295.282.475	73,82	104.717.525
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	123.857.672	76.343.053	61,64	47.514.619
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota	123.857.672	76.343.053	61,64	47.514.619
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan /atau Izin PPLH	47.682.672	5.126.691	10,75	42.555.981

2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	76.175.000	71.216.362	93,49	4.958.638
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	359.936	0	0	359.936
2.11.09.2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	359.936	0	0	359.936
2.11.09.2.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	359.936	0	0	359.936
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	45.331.936	18.820.000	41,52	26.511.936
2.11.10.2.01	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota	45.331.936	18.820.000	41,52	26.511.936
2.11.10.2.01.0004	Peengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	45.331.936	18.820.000	41,52	26.511.936
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19.072.428.033	11.272.921.312	59,11	7.799.506.721
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	19.072.428.033	11.272.921.312	59,11	7.799.506.721
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	528.319.500	198.619.787	37,59	329.699.713
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	18.444.108.533	11.074.301.525	60,04	7.369.807.008
2.11.11.2.01.0020	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST Regional	100.000.000	0	0	100.000.000

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup. Urusan tersebut dijabarkan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada Tahun 2025 ditentukan dari hasil pencapaian kinerja sesuai dengan penetapan kinerja tahun bersangkutan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung selama tahun 2025, Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2025 dibiayai melalui APBD. Pemanfaatan anggaran tersebut terus diupayakan agar dapat memenuhi azas efisiensi, efektifitas dan ekonomis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tahun 2025.

Capaian Pelaksanaan Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2025 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Tujuan dan sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup didukung dengan berbagai program yang capaian kinerja programnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan enunjang Urusan emerintahan Bidang Lingkungan Hidup	98%	98%	-	-	-
				Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	90%	90%	-	-	-
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	-	-	-
				Evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD	90%	90%	-	-	-
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	246/14 orang/bulan	214/14 orang/bulan	-	-	-
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90%	90%	-	-	-
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	2 orang	-	-	-

No.	Urusan Pemerintah/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	1 tahun	1 tahun	-	-	-
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-
				Penyeediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	1 paket	1 paket	-	-	-
				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pengadaan meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	0 unit	Sudah dalam tahap pemesanan dan akan dianggarkan Kembali pada tahun berikutnya.	Akan menghubungi penyedia atau pihak ketiga terkait pemesanan yang telah dilakukan.	-

No.	Urusan Pemerintah/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	-	-	-
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	1 tahun	1 tahun	-	-	-
				Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-	-	-
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-	-	-
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	1 tahun	1 tahun	-	-	-
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	-	-	-
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	257 unit	257 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 unit	49 unit	-	-	-
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
					KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	Belum terlaksananya pembuatan KLHS rencana tata ruang di tahun anggaran 2025.	KLHS RDTR WP IV yang rencananya dikerjakan dengan APBD tahun 2025 telah dilakukan dengan bantuan teknis RDTR Anggaran Belanja Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (ABT PNBP)	-
2.										

No.	Urusan Pemerintah/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
3.									Kementerian ATR/BPN.	
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	RPPLH Kota Bandar Lampung	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	KLHS Kota Bandar Lampung	1 dokumen	0 dokumen	Belum terlaksananya pembuatan KLHS rencana tata ruang di tahun anggaran 2025.	KLHS RDTR WP IV yang rencananya dikerjakan dengan APBD tahun 2025 telah dilakukan dengan bantuan teknis RDTR Anggaran Belanja Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (ABT PNBP) Kementerian ATR/BPN.	-
				Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	Belum terlaksananya pembuatan KLHS rencana tata ruang di tahun anggaran 2025.	KLHS RDTR WP IV yang rencananya dikerjakan dengan APBD tahun 2025 telah dilakukan dengan bantuan teknis RDTR Anggaran Belanja Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (ABT PNBP) Kementerian ATR/BPN.	-
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	68,27 indeks	75,47 indeks	-	-	-
					Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	69,76 indeks	72,03 indeks	-	-	-
					Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,48 indeks	44,56 indeks	-	-	-
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	13.600,7 TonCO2e	12.988,7 TonCO2e	-	-	-
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	2 paket	1 paket	Belum terlaksananya pembuatan dokumen terkait jumlah pengajuan yang dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan.	Dokumen terkait jumlah pengajuan yang dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan akan dilaksanakan pada rencana kerja di tahun berikutnya.	-

No.	Urusan Pemerintah/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Koordinasi, sinkronasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan	1 dokumen	0 dokumen	Belum terakreditasinya UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu juga karena belum menerima dan melakukan pengujian dari luar.	Akan dilakukan pengajuan akreditasi UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup.	-
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DIKPLHD Kota Bandar Lampung	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Pemberian Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-
				Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kab/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-
4.				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terkelola	479,57 Ha	479,57 Ha	-	-	-
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terkelola	479,57 Ha	479,57 Ha-	-	-	-
				Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	479,57 Ha	479,57 Ha	-	-	-

No.	Urusan Pemerintah/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
5.				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	90 badan usaha	106 badan usaha	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan	90 badan usaha	106 badan usaha	-	-	-
				Fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	106 badan usaha	106 badan usaha	-	-	-
6.				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	3 entitas	0 entitas	Sedang dalam pendataan identifikasi sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokasi sosialisasi kegiatan.	Akan menyampaikan surat-surat dan sosialisasi ke sekolah-sekolah.	-

No.	Urusan Pemerintah/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	3 entitas	0 entitas	Sedang dalam pendataan identifikasi sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokasi sosialisasi kegiatan.	Akan menyampaikan surat-surat dan sosialisasi ke sekolah-sekolah.	-
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	3 entitas	0 entitas	Sedang dalam pendataan identifikasi sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokasi sosialisasi kegiatan.	Akan menyampaikan surat-surat dan sosialisasi ke sekolah-sekolah.	-
7.				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	10 pengaduan	25 pengaduan	-	-	-
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	10 pengaduan	25 pengaduan	-	-	-
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	10 pengaduan	25 pengaduan	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang Ditangani	95%	93,66%	-	-	
8.					Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	30%	8,01%	Jumlah Bank Sampah dan TPS 3R yang masih minim di wilayah Kota Bandar Lampung.	Akan mengaktifkan Kembali TPS 3R di wilayah Kota Bandar Lampung.	
					Persentase Cakupan Area Pelayanan	100%	100%	-	-	-
					Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	100%	100%	-	-	-
				Pengelolaan Sampah	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	100%	100%	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 kelompok	7 kelompok	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST regional	250.000 ton	219.000 ton	-	-	-

URAIAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN

Uraian Capaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 62.118.320.582,00 dan terealisasi sebesar Rp. 57.762.206.239,00 atau 92,90 persen. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dengan capaian indikator sebesar 98 persen.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 28.535.422,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.386.758,00. Memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas. Kegiatan ini terealisasi sebesar 29,39 persen.

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 18.615.502,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.716.758,00 atau 25,34 persen yang memiliki target capaian kinerja 3 Laporan dan terealisasi 3 Laporan.

2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 9.919.920,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.670.000,00 atau 37,00 persen yang memiliki target capaian kinerja 2 Laporan dan terealisasi 2 Laporan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 20.504.548.130,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.896.603.250,00. Memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Pemenuhan Dokumen Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel. Kegiatan ini terealisasi sebesar 97,04 persen.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 20.254.191.155,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.687.781.250,00 atau sebesar 97,20 persen yang memiliki target capaian kinerja 246/14 Orang/Bulan dan terealisasi 214/14 Orang/Bulan. Adanya perbedaan jumlah pegawai ini dikarenakan adanya pegawai yang telah pensiun maupun mutase.

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 250.356.975,00 dan terealisasi sebesar Rp. 208.822.000,00 atau 83,41 persen yang memiliki target capaian kinerja 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.006.500,00. Memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Kegiatan ini terealisasi sebesar 18,01 persen.

1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.006.500,00 atau 17,18 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 5 Orang dan terealisasi 2 Orang.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 820.130.941,00 dan terealisasi sebesar Rp. 443.276.276,00 atau terelasisasi sebesar 54,05 persen. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 19.999.439,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.192.766,00 atau sebesar 10,96 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 Paket dan terealisasi 1 Paket.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 178.289.208,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.208.816,00 atau terealisasi sebesar 55,64 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 Paket dan terealisasi 1 Paket.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Rumah Tangga sebesar Rp. 59.999.310,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.699.413,00 atau terealisasi sebesar 21,17 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 Paket dan terealisasi 1 Paket.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 143.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 81.797.000,00 atau terealisasi sebesar 57,20 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 Paket dan terealisasi 1 Paket.

5) Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 159.840.545,00 dan terealisasi sebesar Rp. 105.891.368,00 atau terealisasi sebesar 66,25

persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 Paket dan terealisasi 1 Paket.

6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 84.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.680.000,00 atau terealisasi sebesar 25,81 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen.

7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 175.002.439,00 dan terealisasi sebesar Rp. 119.806.913,00 atau terealisasi sebesar 68,46 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 Laporan dan terealisasi 1 Laporan.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 894.834.179,00 dan terealisasi sebesar Rp. 630.519.999,00 Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor. Kegiatan terealisasi sebesar 70,46 persen.

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yaitu sebesar Rp. 235.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 195.500.000,00 atau terealisasi sebesar 83,19 persen.

2) Sub Kegiatan Pengadaan Meubel

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Meubel yaitu sebesar Rp. 131.839.270,00. dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau terealisasi sebesar 0 persen. Tidak terlaksananya sub kegiatan ini dikarenakan sedang dalam tahap pemesanan, dan akan dianggarkan Kembali pada tahun berikutnya.

3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu sebesar Rp. 527.994.909,00 dan terealisasi sebesar Rp. 435.019.999,00 atau terealisasi sebesar 82,39 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 Unit dan terealisasi 1 Unit.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada kegiatan ini sebesar Rp. 25.341.225.478,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.351.769.587,00. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD. Kegiatan ini terealisasi sebesar 96,10 persen.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik sebesar Rp 141.225.478,00 dan terealisasi sebesar Rp. 91.769.587,00 atau terealisasi sebesar 64,98 persen.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 25.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.260.000.000,00 atau terealisasi sebesar 96,27 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 12 Laporan dan terealisasi 12 Laporan.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 14.479.046.432,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.422.643.869,00. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu Inventaris Kantor yang Terpelihara. Kegiatan ini terealisasi sebesar 85,80 persen.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp 58.670.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.181.500,00 atau terealisasi

sebesar 99,17 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 Unit dan terealisasi 1 Unit.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 13.557.505.048,00 dan teralisasi sebesar Rp. 11.742.313.369,00 atau terealisasi sebesar 86,61 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 257 Unit dan terealisasi sebesar 257 Unit.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 862.871.384,00 dan terealisasi sebesar Rp. 622.149.000,00 atau terealisasi sebesar 72,10 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 49 Unit dan terealisasi 49 Unit.

2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 344.967.120,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 338.728.000,00 atau sebesar 98,19 persen. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu RPPLH Kabupaten/Kota dengan capaian indikator berupa dokumen, RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota dengan capaian indikator berupa dokumen, dan KLHS untuk K/R/P Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian indikator berupa dokumen.

a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 343.900.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 338.728.000,00. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu RPPLH Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini memiliki target kinerja 1 dokumen dan teralisasi sebesar 1 dokumen.

1) Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 343.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 338.728.000,00. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu jumlah dokumen RPPLH Kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi. Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 1 dokumen dan teralisasi sebesar 1 dokumen.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 1.067.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu KLHS Kota Bandar Lampung dengan realisasi 0 persen. Tidak berjalannya kegiatan ini dikarenakan KLHS RDTR WP IV yang rencananya dikerjakan dengan APBD tahun 2025 telah dilakukan dengan bantuan teknis RDTR Anggaran Belanja Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (ABT PNBP) Kementerian ATR/BPN.

1) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang sebesar 1.067.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau terealisasi sebesar 0 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 Dokumen dan terealisasi 0 Dokumen. Tidak berjalannya kegiatan ini dikarenakan KLHS RDTR WP IV yang rencananya dikerjakan dengan APBD tahun 2025 telah dilakukan dengan bantuan teknis RDTR Anggaran Belanja Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (ABT PNBP) Kementerian ATR/BPN.

3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 407.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 266.837.028,00 atau terealisasi sebesar 65,46 persen. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu:

- Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air dengan target kinerja 68,27 Indeks dan capaian indikator yang terealisasi sebesar 75,47 Indeks.
- Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara target kinerja 69,76 Indeks dengan

capaian indikator yang terealisasi sebesar 72,03 Indeks.

- Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan target kinerja 41,48 Indeks dengan capaian indikator yang terealisasi 44,56 Indeks.
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca target kinerja 13600,70 TonCO₂e dengan capaian indikator yang terealisasi sebesar 12988,70 TonCO₂e.

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 60.092.981,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.750.028,00. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium. Pada kegiatan ini terealisasi sebesar 61,16 persen.

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sebesar Rp. 54.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.750.028,00 atau terealisasi sebesar 66,94 persen.

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.192.981,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau terealisasi sebesar 0 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 Dokumen dan terealisasi 0 Dokumen. Belum terealisasinya kegiatan dikarenakan belum menjadi skala prioritas dan belum terakreditasinya UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu juga karena belum menerima dan melakukan pengujian dari luar. Upaya yang akan dilakukan yaitu akan dilakukannya pengujian akreditasi untuk UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 64.900.000,00,00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.842.000,00. Kegiatan ini

memiliki indikator kinerja yaitu DIKPLHD Kota Bandar Lampung yang mana pada kegiatan ini terealisasi sebesar 98,37 persen.

- 1) Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat sebesar Rp. 64.900.000,00,00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.842.000,00 atau sebesar 98,37 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 Laporan dan terealisasi 1 Laporan.

c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada kegiatan ini sebesar Rp. 282.667.019,00,00 dan terealisasi sebesar Rp. 166.245.000,00. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu peningkatan kualitas air, sungai dan udara yang mana pada kegiatan ini terealisasi sebesar 58,81 persen.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi sebesar Rp. 282.667.019,00,00 dan terealisasi sebesar Rp. 166.245.000,00 atau sebesar 58,81 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan.

4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 295.282.475,00 atau sebesar 73,82 persen. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu luas ruang terbuka hijau yang terkelola.

a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp.902.998.260,00 dan terealisasi sebesar Rp.681.933.700,00 atau terealisasi sebesar 75,52%.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 295.282.475,00 atau terealisasi sebesar 73,82 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 479,57 Ha dan terealisasi 479,57 Ha.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebesar Rp. 123.857.672,00 dan terealisasi sebesar Rp. 76.343.053,00 atau sebesar 61,64 persen. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 123.857.672,00 dan terealisasi sebesar Rp. 76.343.053,00 atau sebesar 61,64 persen. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan.

1) Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan /atau Izin PPLH

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan /atau Izin PPLH sebesar Rp. 47.682.672,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.126.691,00 atau sebesar 10,75 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

2) Sub Kegiatan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH) sebesar Rp. 76.175.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 71.216.362,00 atau terealisasi sebesar 93,49 persen. Sub kegiatan ini

memiliki target capaian kinerja 90 badan usaha dan terealisasi 106 badan usaha.

6. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sebesar Rp. 359.936,00 dan direalisasikan sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0 persen. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu predikat sekolah yang berwawasan lingkungan. Program kegiatan ini terealisasi sebesar 0% dari target kinerja yang ditetapkan. Tidak berjalannya program kegiatan ini dikarenakan sedang dalam pendataan identifikasi sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokasi sosialisasi kegiatan.

a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 359.936,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu predikat sekolah yang berwawasan lingkungan. Program kegiatan ini terelaisasi sebesar 0% dari target kinerja yang ditetapkan. Tidak berjalannya program kegiatan ini dikarenakan sedang dalam pendataan identifikasi sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokasi sosialisasi kegiatan.

- 1) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 359.936,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu predikat sekolah yang berwawasan lingkungan. Program kegiatan ini terealisasi sebesar 0% dari target kinerja yang ditetapkan. Tidak berjalannya program kegiatan ini dikarenakan sedang dalam pendataan identifikasi sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokasi sosialisasi kegiatan.

7. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 45.331.936,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.820.000,00 atau sebesar 41,52 persen. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota.

a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 45.331.936,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.820.000,00. Memiliki indikator kinerja yaitu Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH , terealisasi 41,52 persen.

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota sebesar Rp. 45.331.936,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.820.000,00 atau sebesar 41,52 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 10 pengaduan dan terealisasi sebesar 25 pengaduan.

8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 19.072.428.033,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.272.921.312,00 atau terealisasi sebesar 59,11 persen.

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu:

- Timbunan Sampah yang ditangani dengan target kinerja 95 persen dengan capaian kinerja terealisasi sebesar 93,66 persen.
- Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangi melalui 3R dengan target kinerja 30 persen dengan capaian kinerja terealisasi sebesar 8,01 persen. Tidak maksimalnya hasil kinerja kegiatan ini dikarenakan ada beberapa penyebab diantaranya tenaga teknis di lapangan yang mensosialisasikan terkait cara mengoperasikan alat TPS 3R, serta jumlah bank sampah dan TPS 3R yang masih belum beroperasi dengan maksimal di wilayah Kota Bandar Lampung.
- Persentase Cakupan Area Pelayanan dengan target kinerja 100 persen dengan capaian kinerja terealisasi sebesar 100 persen.

- Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani dengan target kinerja 100 persen dengan capaian kinerja terealisasi sebesar 100 persen.

a. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 19.072.428.033,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.272.921.312,00 atau terealisasi sebesar 59,11 persen. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung dan terealisasi sebesar 100 persen.

1) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 528.319.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 198.619.787,00 atau sebesar 37,59 persen. Kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 7 kelompok dan terealisasi sebesar 7 kelompok.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 18.444.108.533,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.074.301.525,00 atau sebesar 60,04 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 1 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen.

3) Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0 persen. Sub kegiatan ini memiliki target capaian kinerja 250.000 ton dan terealisasi sebesar 219.000 ton. Tidak maksimalnya capaian kinerja pada kegiatan ini dikarenakan banyaknya kendaraan yang mengalami kondisi sedang dan rusak berat.

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Tabel 3.2 Kebijakan Strategis terkait Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	-	-	-

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LPJ TAHUN ANGGARAN 2024 YANG TERKAIT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB OPD

Tabel. 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LPJ Tahun Anggaran 2024

No.	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Diharapkan ada kegiatan yang lebih menyentuh langsung ke masyarakat dan harus ada sosialisasi ke masyarakat mengenai sampah agar kegiatan berjalan maksimal.	Terlaksananya sub kegiatan peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan tahun anggaran 2025.	Terlaksananya sosialisasi langsung ke Masyarakat terkait pengelolaan persampahan di kota Bandar Lampung.

3.4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Target dan Capaian Tahun 2025					
		Target	Realisasi	%	Capaian Indikator	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,89	67,31	107,02	Tercapainya nilai IKLH	-	-

Berdasarkan Renstra 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Target dan Capaian Tahun 2025					
		Target	Realisasi	%	Capaian Indikator	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,01	67,31	106,82	Tercapainya nilai IKLH	-	-

Berdasarkan Renstra 2025-2029

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGASPEMBANTUANKAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 tidak melaksanakan dan belum menerima tugas pembantuan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan, baik dari Pemerintah tingkat atas maupun Pemerintah tingkat bawah.

4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Tidak ada hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 tidak melaksanakan dan belum menerima tugas pembantuan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan.

Tabel 4.1. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	DLH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan enunjang Urusan emerintahan Bidang Lingkungan Hidup	98%	98%	-	-	-
				Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	90%	90%	-	-	-
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	-	-	-
				Evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD	90%	90%	-	-	-
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	246/14 orang/bulan	214/14 orang/bulan	-	-	-
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90%	90%	-	-	-
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	2 orang	-	-	-

No.	Urusan Pemerintah/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	1 tahun	1 tahun	-	-	-
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-
				Penyeediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	1 paket	1 paket	-	-	-
				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pengadaan meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	0 unit	Sudah dalam tahap pemesanan dan akan dianggarkan Kembali pada tahun berikutnya.	Akan menghubungi penyedia atau pihak ketiga terkait pemesanan yang telah dilakukan.	-

No.	Urusan Pemerintah/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	-	-	-
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	1 tahun	1 tahun	-	-	-
				Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-	-	-
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-	-	-
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	1 tahun	1 tahun	-	-	-
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	-	-	-
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	257 unit	257 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 unit	49 unit	-	-	-
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
2.					KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	Belum terlaksananya pembuatan KLHS rencana tata ruang di tahun anggaran 2025.	KLHS RDTR WP IV yang rencananya dikerjakan dengan APBD tahun 2025 telah dilakukan dengan bantuan teknis RDTR Anggaran Belanja Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (ABT PNBP)	-

No.	Urusan Pemerintah/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
3.									Kementerian ATR/BPN.	
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	RPPLH Kota Bandar Lampung	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	KLHS Kota Bandar Lampung	1 dokumen	0 dokumen	Belum terlaksananya pembuatan KLHS rencana tata ruang di tahun anggaran 2025.	KLHS RDTR WP IV yang rencananya dikerjakan dengan APBD tahun 2025 telah dilakukan dengan bantuan teknis RDTR Anggaran Belanja Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (ABT PNBP) Kementerian ATR/BPN.	-
				Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	Belum terlaksananya pembuatan KLHS rencana tata ruang di tahun anggaran 2025.	KLHS RDTR WP IV yang rencananya dikerjakan dengan APBD tahun 2025 telah dilakukan dengan bantuan teknis RDTR Anggaran Belanja Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (ABT PNBP) Kementerian ATR/BPN.	-
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	68,27 indeks	75,47 indeks	-	-	-
					Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	69,76 indeks	72,03 indeks	-	-	-
					Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,48 indeks	44,56 indeks	-	-	-
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	13.600,7 TonCO ₂ e	12.988,7 TonCO ₂ e	-	-	-
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	2 paket	1 paket	Belum terlaksananya pembuatan dokumen terkait jumlah pengajuan yang dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan.	Dokumen terkait jumlah pengajuan yang dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan akan dilaksanakan pada rencana kerja di tahun berikutnya.	-

No.	Urusan Pemerintah/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Koordinasi, sinkronasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan	1 dokumen	0 dokumen	Belum terakreditasinya UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu juga karena belum menerima dan melakukan pengujian dari luar.	Akan dilakukan pengajuan akreditasi UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup.	-
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DIKPLHD Kota Bandar Lampung	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Pemberian Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-
				Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kab/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-
4.				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terkelola	479,57 Ha	479,57 Ha	-	-	-
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terkelola	479,57 Ha	479,57 Ha-	-	-	-
				Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	479,57 Ha	479,57 Ha	-	-	-

No.	Urusan Pemerintah/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
5.				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	90 badan usaha	106 badan usaha	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan	90 badan usaha	106 badan usaha	-	-	-
				Fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	106 badan usaha	106 badan usaha	-	-	-
6.				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	3 entitas	0 entitas	Sedang dalam pendataan identifikasi sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokasi sosialisasi kegiatan.	Akan menyampaikan surat-surat dan sosialisasi ke sekolah-sekolah.	-

No.	Urusan Pemerintah/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	3 entitas	0 entitas	Sedang dalam pendataan identifikasi sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokasi sosialisasi kegiatan.	Akan menyampaikan surat-surat dan sosialisasi ke sekolah-sekolah.	-
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	3 entitas	0 entitas	Sedang dalam pendataan identifikasi sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokasi sosialisasi kegiatan.	Akan menyampaikan surat-surat dan sosialisasi ke sekolah-sekolah.	-
7.				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	10 pengaduan	25 pengaduan	-	-	-
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	10 pengaduan	25 pengaduan	-	-	-
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	10 pengaduan	25 pengaduan	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang Ditangani	95%	93,66%	-	-	
8.					Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	30%	8,01%	Jumlah Bank Sampah dan TPS 3R yang masih minim di wilayah Kota Bandar Lampung.	Akan mengaktifkan Kembali TPS 3R di wilayah Kota Bandar Lampung.	
					Persentase Cakupan Area Pelayanan	100%	100%	-	-	-
					Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	100%	100%	-	-	-
				Pengelolaan Sampah	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	100%	100%	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan/ Bid. Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 kelompok	7 kelompok	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST regional	250.000 ton	219.000 ton	-	-	-

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk tahun 2025 dilihat dari pencapaian kinerja strategis terdapat 8 (delapan) program kerja, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2025 secara umum sudah mendekati sasaran dan program dalam penetapan kinerja tahun 2025. Namun demikian, capaian kinerja itu tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung harus tetap ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan itu sendiri sehingga visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung dapat terwujud.

LAMPIRAN

1. Data Inovasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KET
1	Dinas Lingkungan Hidup	Budidaya Magot Solusi Pengelolaan Sampah Organik (Budaya Sila Pamor)	
2	Dinas Lingkungan Hidup	Patroli Angkutan Sampah 24 Jam (PAS 24 JAM)	
3	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Ramah Lingkungan (KRL)	
4	Dinas Lingkungan Hidup	Pembersihan Kali oleh SATGAS KALI Dinas Lingkungan Hidup	
5	Dinas Lingkungan Hidup	Kolam Lindi Bersih, Sungai Bebas Pencemaran	
6	Dinas Lingkungan Hidup	Sertifikat Layak Operasi IPAL setiap lokasi usaha	
7	Dinas Lingkungan Hidup	Taman Kota Indah	
8	Dinas Lingkungan Hidup	Inovasi Daerah Terkait Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Berbasis E-Government	
9	Dinas Lingkungan Hidup	Pengawasan Lingkungan Cepat, Tanggap, Masyarakat Sehat	
10	Dinas Lingkungan Hidup	Peremajaan Pohon Penghijauan	
11	Dinas Lingkungan Hidup	Gerakan Bersama untuk Keberlanjutan Lingkungan (GEBER TALING)	
12	Dinas Lingkungan Hidup	Pupuk Kompos Ciptakan Lingkungan Asri Masyarakat Mandiri (POSTA LINGA MAMA)	
13	Dinas Lingkungan Hidup	Solusi Transaksi Elektronik BRI (STROBERI)	

2. Data Inovasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KET
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemanfaatan Kain Perca Solusi Pengelolaan Sampah Tekstil	
2	Dinas Lingkungan Hidup	Satgas PAS (Satuan Tugas Patroli Angkutan Sampah)	
3	Dinas Lingkungan Hidup	Pembersihan Kali oleh SATGAS KALI Dinas Lingkungan Hidup	
4	Dinas Lingkungan Hidup	Taman Kota Indah	
5	Dinas Lingkungan Hidup	Inovasi Daerah Terkait Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Berbasis e-Government	
6	Dinas Lingkungan Hidup	Peremajaan Pohon Penghijauan	

7	Dinas Lingkungan Hidup	Pro Taling (Program Komunitas untuk Keberlanjutan Lingkungan)	
8	Dinas Lingkungan Hidup	Taman Kompos (mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos)	
9	Dinas Lingkungan Hidup	Solusi Transaksi BRI (STROBERI)	
10	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Keberlanjutan Lingkungan	
11	Dinas Lingkungan Hidup	Budidaya Magot Solusi Pengelolaan Sampah Organik (Budaya Sila Pamor)	
12	Dinas Lingkungan Hidup	Kolam Lindi Bersih, Sungai Bebas Pencemaran	
13	Dinas Lingkungan Hidup	Sertifikat Layak Operasi IPAL setiap Lokasi Usaha	
14	Dinas Lingkungan Hidup	Pengawasan Lingkungan Cepat, Tanggap, Masyarakat Sehat	
15	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Ramah Lingkungan (KRL)	